

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk. Fenomena yang menggambarkan hal ini yaitu tingginya tingkat inflasi, tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan tingginya tingkat kemiskinan, hutang luar negeri, kurs rupiah yang tidak stabil sehingga menyebabkan kondisi yang tidak kondusif bagi sektor- sektor perbankan dan riil secara umum.

Dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga macam sumber usaha ekonomi nasional yaitu sektor BUMN, BUMS, dan sektor Koperasi. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut yang diharapkan untuk dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional yaitu koperasi. Sektor swasta ikut berperan serta dalam perekonomian dengan tujuan mencari laba, sedangkan koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya, bukan mencari profit. Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 menyebutkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. anggota sehingga dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan koperasi. Oleh karena itu dirasakan perekonomian yang cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan

usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga, Ayat ini mengandung esensi demokrasi ekonomi yaitu kemakmuran rakyat merupakan hal pokok yang diutamakan, produksi dalam organisasi dilakukan oleh semua anggota dan kepemilikannya oleh usaha lain tidak dapat melaksanakan akibat adanya hambatan peraturan. Dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sesuai dengan dasar, jiwa, dan dorongan sistem ekonomi berorientasi pada sistem kerakyatan. Suatu bentuk bukti kebaikan koperasi terhadap masyarakat kecil yaitu adanya tuntutan keadilan tentang kemakmuran sosial atau kemakmuran bersama seluruh anggota. Koperasi merupakan pencerminan cita-cita agar kedaulatan rakyat melandasi bidang kehidupan ekonomi. Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Koperasi ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangkaian mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Koperasi sekaligus juga sebagai soko guru perekonomian di Indonesia.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, yakni melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Menurut Baswir (2000:2) : “Dalam

koperasi itu sendiri setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi dan unsur yang kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk badan usaha, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi mempunyai watak sosial dan keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi”.

Karena pada hakikatnya koperasi adalah badan usaha, sebagai badan usaha koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dan pada dasarnya koperasi merupakan organisasi yang terbentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi (Halomoan dan Arifin, 2001 : 71).

Pembangunan koperasi di Indonesia sebagai wadah ekonomi rakyat diharapkan dapat turut serta dalam mengurangi berbagai ketimpangan ekonomi, melaksanakan pemerataan untuk mencapai pertumbuhan yang menyeluruh, menghapus ketergantungan ekonomi kelompok miskin dan menghapus kemiskinan. Koperasi mempunyai keunggulan untuk melaksanakannya dengan adanya partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi dengan meminimalisir pola hubungan atas-bawah dalam struktur organisasinya.

Amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa sistem perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sebelum amandemen ke-4 dan dihapusnya seluruh Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, di dalam penjelasan atas Pasal 33 disebutkan bahwa bentuk usaha tersebut yang sesuai adalah koperasi (Pandji, 2007 : 243). Penggolongan jenis-jenis koperasi disesuaikan dengan kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian koperasi di Indonesia digolongkan menjadi 4 jenis yang terdiri dari : koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Di antara jenis-jenis koperasi tersebut salah satu jenis koperasi yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam. Salah satu tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam tidak memakai istilah “kredit” seperti halnya di bank tetapi menggunakan istilah “pinjaman” (Andinna, 2012 : 6).

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai karakter tersendiri, karakter khusus yang dimiliki koperasi inilah yang membedakan koperasi dengan bentuk badan usaha lain. Dalam kegiatan usahanya koperasi tidak hanya berorientasi dalam mencari keuntungan saja melainkan berorientasi pada manfaat. Pada dasarnya tujuan koperasi ialah mensejahterakan anggota khususnya, dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Tetapi dalam usaha-usahanya koperasi harus tetap memperoleh hasil yang layak. Sehingga pada akhir periode usahanya diharapkan dan ditargetkan menghasilkan sisa hasil usaha. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, informasi dan teknologi. Karena itu koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya. Setiap usaha yang dilakukan oleh koperasi selalu mengharapkan akan berkembang dan maju, maka koperasi memerlukan dana untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dan investasi. Sehingga koperasi harus menentukan jumlah dana yang dibutuhkan dan cara memperolehnya. Dana tersebut diperoleh dari pemasukan pemilik usaha dan sumber-sumber yang lainnya.

Perkembangan dalam usaha koperasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya debitor yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitor

dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat di katakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang diperoleh menurun. Disamping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan.

Pemberian pinjaman merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Dimana menurut Kasmir (2007:102) definisi kredit/pinjaman adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan maksud setiap anggota harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh koperasi dimana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian Pinjaman untuk memastikan kelancaran pembayaran pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa mengganggu jalannya

usaha koperasi dan juga merugikan koperasi terutama dalam pencapaian keuntungan.

Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lebih murah dan mudah dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian pinjaman, masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi dengan KSP karena untuk mengajukan dan seleksi atas permohonan pinjaman lebih mudah daripada badan usaha lainnya. Dalam KSP, tanpa jaminan anggota bisa mendapatkan pinjaman tetapi bagi masyarakat umum bisa hanya menggunakan BPKB dan surat keterangan usaha. Sehingga peluang untuk pengembangan KSP di wilayah Ujung Berung Bandung cukup besar karena melihat sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang UMKM. Koperasi Konsumen PKK Taruna Parahyangan Ujung Berung merupakan salah satu koperasi di Bandung yang bergerak dalam pemberian kredit pinjaman. Sama halnya dengan KSP lain, Koperasi Konsumen PKK Taruna Parahyangan Ujung Berung memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja sama dengan pihak lain. Dilihat dari perkembangan anggotanya, Koperasi Konsumen PKK Taruna Parahyangan Ujung Berung mengalami penambahan jumlah simpanan dan pendapatan anggota. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.1

Struktur Modal, Penyaluran Pinjaman Anggota dan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Konsumen PKK Taruna Parahyangan Ujung Berung Bandung Periode Tahun 2008-2017.

Struktur Modal, Penyaluran Pinjaman dan Sisa Hasil Usaha				
No	Tahun	Struktur Modal	Penyaluran Pinjaman	SHU
1	2008	337.723.118	827.750.100	72.798.285
2	2009	434.069.547	1.357.430.347	101.511.405
3	2010	804.189.579	2.267.434.000	166.153.969
4	2011	1.305.728.832	3.492.106.738	263.693.950
5	2012	1.609.550.204	4.023.235.000	321.723.464
6	2013	1.949.042.454	5.534.070.000	413.104.327
7	2014	2.174.079.054	4.662.581.000	450.713.398
8	2015	2.112.546.354	4.939.850.000	518.053.397
9	2016	2.634.951.715	5.717.168.100	412.171.938
10	2017	3.258.733.915	6.537.600.600	558.760.000

Keberhasilan pemberian pinjaman tidak terlepas dari prosedur pemberian yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian pinjaman kepada anggota. Prosedur pemberian pinjaman merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan, dengan kata lain bahwa prosedur pemberian pinjaman mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjam beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian pinjaman sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan pinjaman usaha, sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya. Koperasi harus melakukan beberapa prosedur pemberian pinjaman dengan baik. Dalam kegiatan pemberian pinjaman, kendala yang biasanya dihadapi dalam pemberian

pinjaman adalah kredit macet dan kemungkinan terdapat kendala-kendala yang lain.

Harus diakui bahwa untuk mengembangkan koperasi secara baik sebagaimana yang diharapkan, maka pengelolaannya harus baik pula. Artinya koperasi tidak dapat berdiri tegak dan kuat tanpa adanya pengelolaan yang baik dan sehat. Koperasi dituntut demikian karena kedudukannya dewasa ini bukan hanya mengejar asas kekeluargaan dan kegotong-royongan tetapi perlu menjalankan fungsinya demi kesejahteraan anggota. Konotasinya bahwa walaupun koperasi bukan kumpulan modal tetapi harus mempunyai modal untuk berkembang atau dengan kata lain, koperasi tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan tetapi diharapkan memperoleh keuntungan untuk berkembang di masa yang akan datang. Tentang harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, tidak terlepas dari upaya efisiensi dalam koperasi itu sendiri, karena makin tinggi tingkat efisiensi pada akhirnya akan membawa koperasi pada pencapaian profitabilitas yang tinggi. Seperti halnya lembaga-lembaga atau badan usaha lain, maka koperasi selalu menghadapi berbagai persoalan di mana persoalan tersebut pada hakikatnya timbul dari suasana lingkungan yang secara langsung mempengaruhi operasionalisasi koperasi itu sendiri. Khusus tentang lingkungan internal, maka pada kebanyakan koperasi belum mampu mengadministrasikan kegiatan-kegiatannya secara baik sesuai standar tertentu sehingga penyediaan data untuk mengambil keputusan juga belum lengkap, termasuk di dalamnya pengambilan

keputusan dalam hal pengelolaan dana. Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja koperasi tidak mengenal istilah “laba” karena tujuan kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba melainkan berorientasi pada manfaat yang didapat anggota. Laba dalam koperasi lebih di kenal dengan sebutan Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak.

Keuntungan dalam koperasi disebut dengan sisa hasil usaha. Menurut UU No 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 bahwa sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Mengingat tujuan utama koperasi yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka, maka koperasi berupaya mengadakan unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Kegiatan operasional koperasi, pasti membutuhkan modal demi tercapainya tujuan koperasi

tersebut. Koperasi memerlukan modal yang dapat seoptimal mungkin sehingga mampu menghasilkan SHU yang maksimal.

Sebagai badan usaha, koperasi memperoleh pendapatan atau hasil usaha sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Dalam setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan : Cadangan koperasi, Jasa anggota, Dana Pengurus, Dana Pegawai, Dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan daerah Kerja. Adapun cara dan besarnya penyisihan SHU ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) masing-masing koperasi.

Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi pada setiap tahunnya menjadi sangat penting. Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya. Besarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya juga sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan

usaha yang bergerak di bidang ekonomi melaksanakan akuntansi dalam kegiatan usahanya seperti badan usaha lainnya.

Semakin besar SHU yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Dan untuk meningkatkan perolehan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya. Modal koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal utama tersebut bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan-simpanan tersebut akan semakin bertambah jumlahnya apabila terjadi penambahan anggota, ini berarti modal koperasi menjadi semakin banyak pula. Namun apabila ada anggota yang keluar karena merasa tidak sesuai lagi dengan tujuan koperasi, maka simpanan anggota yang akan keluar tersebut dapat diambil kembali yang mengakibatkan modal koperasi berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus dituntut untuk bekerja keras agar tidak ada anggota yang keluar dari koperasi dan modalpun tetap bahkan bertambah.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari : anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lainnya yang sah. Permodalan koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh

anggota, akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanen atau sementara.

Pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber pembelanjaan koperasi terdiri dari kreditur, anggota atau pemilik dan badan usaha koperasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai eksistensi tersendiri yang terpisah dari anggota-anggotanya. Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor oleh anggota, maka akan semakin besar pada keleluasaan para anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan SHU yang dapat diperoleh pihak koperasi. Jika, para pengurus berusaha meningkatkan partisipasi para anggotanya. Anggota koperasi akan berpartisipasi aktif dalam koperasi apabila kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi dan koperasi mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para anggotanya sehingga modal koperasi akan terus bertambah.

Terkait dengan keputusan dalam hal pengelolaan penggunaan dana, maka pihak koperasi harus mampu mengalokasikan sumberdaya keuangan yang dimiliki secara efisien serta menekan biaya-biaya penggunaan dana sehingga akan mampu meningkatkan laba atau yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) pada saat mendatang. Jadi efisiensi yang dimaksudkan adalah bagaimana koperasi mampu menghasilkan laba (SHU) dengan kekayaan atau modal yang dimiliki, baik modal asing maupun modal sendiri (equity) (Leunupun Pieter. 2003).

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai **“Pengaruh Struktur Modal dan Penyaluran Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha yang dibagikan”**(Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen PKK Taruna Parahyangan Ujung Berung Bandung Periode Tahun 2008-2017).

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat luasnya aspek yang dapat dihubungkan dengan judul diatas, maka masalah yang akan dibahas secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pembangunan koperasi di Indonesia sebagai wadah ekonomi rakyat diharapkan dapat turut serta dalam mengurangi berbagai ketimpangan ekonomi, melaksanakan pemerataan untuk mencapai pertumbuhan yang menyeluruh, menghapus ketergantungan ekonomi kelompok miskin dan menghapus kemiskinan.
2. Semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang di diperoleh menurun. Disamping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan.
3. Dimana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian pinjaman untuk memastikan kelancaran pembayaran pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa

mengganggu jalannya usaha koperasi dan juga merugikan koperasi terutama dalam pencapaian keuntungan.

4. Dalam kegiatan pemberian pinjaman, kendala yang biasanya dihadapi dalam pemberian pinjaman adalah kredit macet dan kemungkinan terdapat kendala-kendala yang lain.
5. Khusus tentang lingkungan internal, maka pada kebanyakan koperasi belum mampu mengadministrasikan kegiatan-kegiatannya secara baik sesuai standar tertentu sehingga penyediaan data untuk mengambil keputusan juga belum lengkap, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan dana.
6. Kegiatan operasional koperasi, pasti membutuhkan modal demi tercapainya tujuan koperasi tersebut. Koperasi memerlukan modal yang dapat seoptimal mungkin sehingga mampu menghasilkan SHU yang maksimal.
7. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi melaksanakan akuntansi dalam kegiatan usahanya seperti badan usaha lainnya.
8. Apabila ada anggota yang keluar karena merasa tidak sesuai lagi dengan tujuan koperasi, maka sehubungan dengan hal tersebut, pengurus dituntut untuk bekerja keras agar tidak ada anggota yang keluar dari koperasi dan modal pun tetap bahkan bertambah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Struktur Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha Yang Dibagikan ?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Penyaluran Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha yang dibagikan ?
3. Apakah Secara Simultan Terdapat Pengaruh Struktur Modal dan Penyaluran Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha yang dibagikan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Struktur Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha yang dibagikan
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Penyaluran Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha yang dibagikan.
3. Untuk Mengetahui Secara Simultan Pengaruh Struktur Modal dan Penyaluran Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha Yang Dibagikan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang manajemen keuangan terutama mengenai penerapan variabel struktur modal dalam perkoperasian. Dapat mengetahui sejauh mana pengaruh Srtuktur Modal dan Penyaluran Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi serta memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi KSP

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada khususnya, dan bagi koperasi lain pada umumnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan kemampuan dalam menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para civitas akademika khususnya dalam hal yang berkaitan dengan variabel struktur modal.

1.6 Kerangka Pemikiran

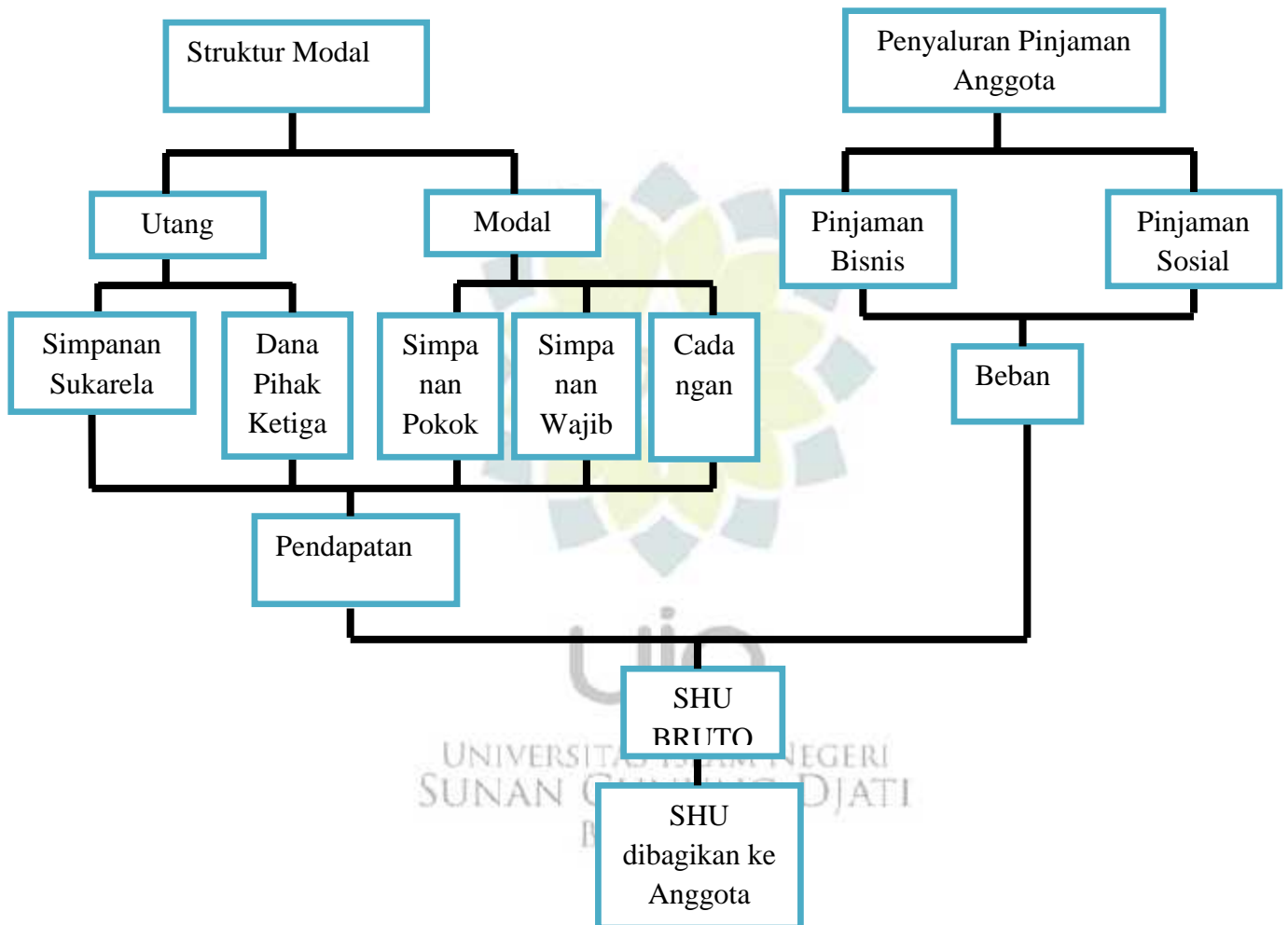
Struktur Modal mempengaruhi Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang. Modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan kegiatan koperasi. Tanpa adanya modal yang cukup koperasi tidak akan berjalan. Dengan adanya struktur modal dalam koperasi jelaslah mana yang modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dan modal pinjaman digunakan untuk menjalankan usaha koperasi dalam upaya

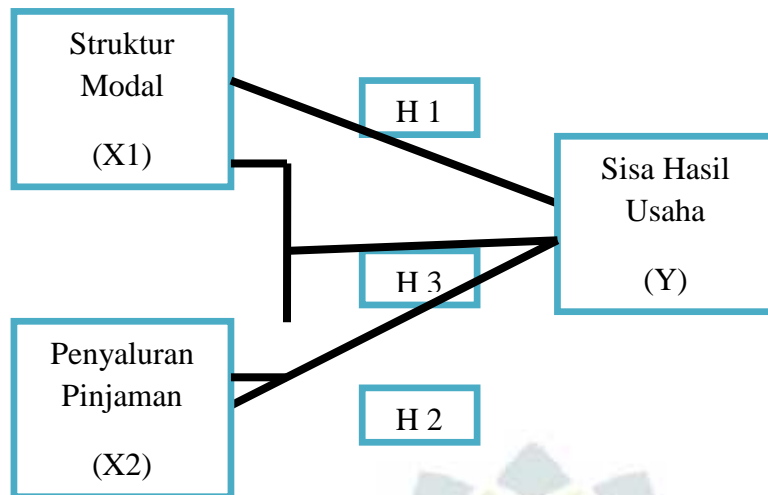
memperoleh SHU pada setiap akhir periode. Modal pinjaman merupakan modal dari kreditur yang dibebani biaya bunga. Oleh karena itu rata-rata pengembalian modal pinjaman harus lebih besar dari biaya bunga sehingga akan berpengaruh positif terhadap perolehan SHU.



Gambar 1.1

Bagan Alur Pengaruh Struktur Modal dan Penyaluran Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Yang Dibagikan.





1.7 Penelitian Terdahulu

Table 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	Peneiliti	Judul	Hasil Penelitian	Variabel yang diteliti
1	Lubuk Novi Suryaningrum (2007)	Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada KPRI Di Kota Semarang.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa modal sendiri (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dengan hubungan positif. Hal ini berarti semakin besar modal sendiri yang	Variabel Independen : Modal Sendiri, Variabel Dependen : Sisa Hasil Usaha

			dimiliki maka akan semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi.	
2	Mailiya Choiriyah (2005)	Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada KPRI Se Kabupaten Demak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur finansial dan struktur modal KPRI Di Kabupaten Demak dalam keadaan baik, hal ini ditunjukkan dengan prosentase rasio modal sendiri lebih besar dibandingkan modal pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) sehingga menjamin likuiditas dan solvabilitas KPRI, sedangkan hasil perhitungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Modal sendiri	Variabel Independen: Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Variabel Dependen: Sisa Hasil Usaha

			dengan modal pinjaman	
3.	Moch. Soedfarto (2004)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada BANK Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR Di Wilayah Kerja BI Semarang).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang akan berpengaruh secara significant yaitu tingkat suku bunga BPR, tingkat kecukupan modal BPR, jumlah simpanan masyarakat pada BPR dan jumlah kredit non lancar pada BPR.	Variabel Independen: ada empat yang digunakan yaitu tingkat suku bunga BPR, tingkat kecukupan modal BPR, jumlah simpanan masyarakat pada BPR dan jumlah kredit non lancar pada BPR. Variabel Dependen: yang digunakan adalah total kredit yang disalurkan BPR di wilayah kerja BI Semarang.
4.	Fadhillah (2005)	Analisis Pengaruh Pelaksanaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Variabel independen:

		Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perkembangan Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan.	variabel kredit mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UKM mitra binaan.	analisis pengaruh pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan perkembangan mitra binaan.
5.	Hasibuan (2005)	Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Kemampuan Usaha Kecil Percetakan di Kelurahan Medan Barat.	Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah variabel kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan usaha kecil. Dengan uji t perbedaan dua rata-rata diketahui bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara jumlah kemampuan para pelaku kecil sebelum dan sesudah menerima kredit.	Variabel Independen: pengaruh pemberian kredit Variabel Dependen: peningkatan kemampuan usaha kecil percetakan .
6.	Safrida (2008)	Pengaruh Struktur Modal, dan	Hasil penelitian membuktikan secara	Variabel independen:

		Pertumbuhan Perusahaan Pada Nilai Perusahaan.	simultan struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial bahwa struktur modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.	Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan. Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.
7.	Eka (2010)	Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan struktur modal, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial struktur modal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan.	Variabel independen: Pengaruh Struktur Modal dan Kepemilikan Manajerial. Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.
8.	Anni Vigren	Pengaruh struktur	Hasil penelitian	Variabel

	(2009)	modal pada perusahaan kecil dan menengah di Finlandia	menunjukkan bahwa kendala keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio hutang. Sedangkan faktor lainnya cukup berpengaruh seperti aset tetap, umur, profitabilitas, pemilik tunggal dan pendanaan internal yang cukup	independen: aset tetap, umur, profitabilitas, pemilik tunggal dan pendanaan internal yang cukup, kendala keuangan Variabel dependen: rasio hutang
--	--------	---	---	--

1.8 Hipotesis

Hipotesis 1

Ho : Terdapat Pengaruh Struktur Modal Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha.

Ha : Tidak Terdapat Pengaruh Struktur Modal Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha.

Hipotesis 2

Ho : Terdapat Pengaruh Penyaluran Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha.

Ha : Tidak Terdapat Pengaruh Penyaluran Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha.

Hipotesis 3

Ho : Terdapat Pengaruh Struktur Modal Dan Penyaluran Pinjaman Anggota Secara Simultan Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha.

Ha : Tidak Terdapat Pengaruh Struktur Modal Dan Penyaluran Pinjaman Anggota Secara Simultan Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha.